



NAZHARAT:
JURNAL KEBUDAYAAN
Vol. 30 No. 01, Juni 2024



**SUNGAI BATANGHARI DALAM PERADABAN MASYARAKAT MELAYU
 JAMBI PADA MASA KERESIDENAN 1906 – 1942**

MARIYO ROMADON

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Email : mariyo.romadon22@mhs.uinjkt.ac.id

Abstrak

Letak geografi Wilayah Jambi ada pada cekungan Sungai yang disebut dengan Sungai Batanghari. Sungai Batanghari sendiri dikenal dengan tempat bermuaranya anak-anak sungai yang ada di perairan wilayah Jambi. Sungai Batanghari mengalir dari hulu ke hilir menuju ke arah Tanjung Jabung Timur. Sungai Batanghari bersinggungan langsung dengan beberapa selat, seperti Selat Berhala, Selat Karimata, dan Selat Malaka. Selain itu, Sungai Batanghari juga bersentuhan dengan beberapa laut, seperti Laut Natuna, dan Laut Cina. Keberadaan Sungai ini memegang peran utama dalam pengaturan distribusi hasil pertanian, perkebunan dan hasil Sungai yang ada di wilayah Jambi untuk diperdagangkan. Munculnya produk baru dan kemitraan baru dalam dunia bisnis erat terkait dengan perkembangan masyarakat Melayu Jambi. Dari pertengahan tahun 1600 hingga akhir 1900-an, Jambi mendapatkan manfaat dari aktivitas perdagangan, termasuk lada, rempah-rempah, emas, karet, dan komoditas lainnya. Pada masa Keresidenan, Sungai Batanghari berfungsi sebagai pendorong utama dalam dinamika perekonomian dan perubahan sosial budaya masyarakat Jambi. Sungai Batanghari, sebagai jalur utama penghubung antara daerah hulu dan hilir wilayah Jambi, juga memberikan kontribusi yang signifikan. Penelitian ini merupakan studi sejarah yang dalam tahapan penelitiannya sejarah meliputi, Pertama Heuristik atau Pengumpulan data, kedua Kritik

مستخلص

البحث

Abstract

Sumber atau verifikasi data, ketiga Interpretasi atau penafsira dari data yang telah di verifikasi, dan terkahir Historiografi atau penulisan ulang sejarah. Dalam analisisnya, penelitian ini mengadopsi teori Alfred Thayer Mahan untuk memahami peran Sungai Batanghari dalam peradaban masyarakat Melayu Jambi pada masa keresidenan 1906-1942.

Kata Kunci: *sungai batanghari, keresidenan, peradaban masyarakat melayu jambi*

كلمات
أساسية
Keyword

INTRODUCTION (مقدمة)

Peradaban Maritim dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berkaitan Perairan yang didalamnya terdapat begitiu banyak komponen pelayaran, pelabuhan, perdagangan, dan lainnya baik dalam konteks lautan maupun Sungai. Indonesia sendiri sebelum dikenal dengan Nama itu merupakan daerah yang dulunya bernama Nusantara pada masa awal abad 1 Masehi samapai pada datangnya kolonial Belanda dan berubah menjadi Hindia Belanda, sebuah negara maritim dengan daerah perairan lebih luas ketimbang daerah daratannya. Oleh karena itu, aktivitas masyarakat, terutama di sektor ekonomi, dapat dianggap terbagi menjadi dua kelompok utama. Kelompok pertama adalah masyarakat menggantungkan hidupnya pada Hasil air, seperti hasil dari sumber daya laut dan hasil sumber daya Sungai. Sedangkan kelompok kedua merupakan masyarakat yang memanfaatkan sumber daya yang ada pada daratan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari (Ilham, 2019).

Terhitung sejak paruh pertengahan Abad ke-5 Masehi, daerah Asia Tenggara, terutama sekitar Selat Malaka, sudah menjadi sorotan yang ramai dibicarakan. Hal ini terkonfirmasi dengan fakta bahwa sejak periode abad ke-5 Masehi, pelayaran dari pihak asing telah mencapai tingkat signifikan di area ini (A.B. Lopian, 1992). Seiring perkembangan waktu, Kerajaan Sriwijaya Mulai dikenal oleh mancanegara di dunia. Tak terkecuali juga samping Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Melayu Jambi kemudian juga turut menjadi perhatian dan dikenal oleh Dunia. Dua kerajaan Besar yang ada di Sumatra ini

menjalin hubungan yang sangat harmonis, tanpa adanya rivalitas. Hubungan antara Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Melayu Jambi terjadi karena Seluruh Kerajaan Melayu berada di bawah kekuasaan Sriwijaya, atau dengan kata lain, bahwa kerajaan Sriwijaya telah berhasil menaklukkan Kerajaan Melayu Jambi. Pada tahun 1082 Masehi, kemudian pada Akhir Kerajaan Sriwijaya atau tepatnya pada saat banga Cholla menyerang, pusat pemerintahan Sriwijaya dipindahkan dari Palembang ke Jambi (Guillot, 2008). Berpindahnya Pusat kerajaan Sriwijaya ke Jambi terjadi karena adanya peperangan di Sriwijaya pada tahun 1025 M, kemudian para bangsawan yang masih hidup mempertahankan dirinya dengan melarikan diri ke pedalaman dan hulu Sungai Batanghari di Jambi untuk dapat selamat. Mereka kemudian bergabung dan berlindung kepada kerajaan Melayu Jambi yang pada saat itu merupakan Pusat Kerajaan Sriwijaya yang telah dipindahkan.

Elsbeth Locher-scholten mengatakan, berdasarkan tulisan Barbara Watson Andaya, pada tahun 1616 Jambi dianggap sebagai pelabuhan terkaya dan teramai kedua di Sumatra setelah Aceh. Kesultanan Jambi mendapatkan keuntungan sekitar 30 hingga 35 persen dari hasil penjualan lada, menurut perkiraan Hindia Timur Belanda (VOC). Jambi sangat terlibat dalam politik regional. Pada tahun 1670-an, Jambi secara ekonomi dan politik setara dengan Palembang dan Johor (Elsbeth locher-sholten, 2008). Peran Krusial yang di mainkan oleh Sungai Batanghari sangat penting dalam perkembangan peradaban Melayu di Jambi. Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap aspek kehidupan masyarakat Melayu Jambi pada periode awal berkembang seiring dengan peradaban Sungai yang berkembang di wilayah sumatera, dan Sungai Batanghari menjadi inti dari seluruh sistem Sungai di Jambi. Dampak dari peradaban Sungai ini tampak pada berbagai dimensi, termasuk aspek sosial, kebudayaan, agama, politik, dan yang paling krusial adalah sektor ekonomi (KemPen, 2018).

Peradaban Sungai ada dan dibangun setidaknya pada permulaan abad pertama Masehi. Jalur perdagangan ini bermula di Perairan Cina di sebelah timur dan berakhir di Iskandariah di pantai Laut Tengah. Perjalanan ini melewati Laut Cina Selatan, Selat Malaka, Lautan Hindia, terus ke Teluk Persia, atau bahkan mencapai Laut Merah. Sejarawan berpendapat bahwa dengan adanya keberadaan jalur perdagangan inilah yang kemudian menjadi pendorong utama muncul dan lahirnya berbagai kerajaan-kerajaan dan pelabuhan-pelabuhan dagang yang ada di sepanjang jalur tersebut. Catatan sejarah dari

sumber-sumber Cina mengungkapkan bahwa di wilayah Jambi, telah berdiri beberapa kerajaan sejak abad ke-3 Masehi. Bukti sejarah yang ada dan tercatat bahwa pada abad ke-7 Sriwijaya melakukan ekspansi menuju wilayah-wilayah Melayu yang ada di Sumatera sampai ke wilayah Melayu Jambi, hal ini dapat dilihat dari beberapa sumber sejarah arkeologi yang ditemukan di sepanjang tepian Sungai dan anak Sungai Batanghari seperti Sungai Merangin yang ditemukannya prasasti Karang Birahi. Dalam prasasti ini menyebutkan tentang persumpahan yang mana diwajibkan kepada seluruh wilayah yang telah ditaklukkan oleh kerajaan Sriwijaya untuk tunduk. Pada kerajaan Sriwijaya, bagi yang tidak mau tunduk kemudian akan diberi sanksi (Bambang, 1994). Hal ini menjadi bukti bahwa pada saat itu wilayah Jambi berada dibawah kekuasaan Sriwijaya. Pada masa ini Sungai Batanghari dijadikan sebagai sarana dalam melakukan aktivitas seperti perdagangan dan penyebaran agama Buddha yang kemudian jejak sejarahnya dapat ditemukan di Jambi yakni situs percandian Muaro Jambi yang merupakan tempat peribadatan agama Buddha yang terluas di Asia Tenggara. Jambi dibawah kekuasaan kerajaan Sriwijaya berlangsung cukup lama yakni dimulai dari abad ke VII sampai dengan Abad ke XII.

Setelah Kerajaan Sriwijaya runtuh karena konflik dengan Kerajaan Chola dari India Selatan, Kerajaan Melayu kembali menjadi negara yang merdeka. Studi sejarah tentang ekspedisi Pamalayu yang dimulai oleh Kartanegara pada akhir abad ke-13 menunjukkan bahwa pusat pemerintahan Kerajaan Melayu berada di Dharmasraya, yang sekarang merupakan provinsi Sumatera Barat. Dalam pemerintahan Adityawarman pada abad keempat belas, pusat pemerintahan dipindahkan ke Pagaruyung, sebuah Kota di pedalaman Sumatera Barat yang merupakan pusat kebudayaan Minangkabau (Arif, 2021). Atas inisiatif Puteri Selaras Pinang masak, putri dari Raja yang berkuasi di Kerajaan Pagaruyung, Sumatra Barat, Jambi baru kemudian mulai mendirikan kerajaan pada abad ke-15. Kerajaan Jambi ada sejak tahun 1480 dan dikenal karena peradabannya di sekitar Sungai Batanghari. Sampai Belanda mengalahkan Sultan Thaha pada tahun 1904, mengakhiri Kerajaan Jambi.

Gugurnya Sulthan Thaha Syaifuddin dalam perang melawan Kolonial Belanda pada tahun 1904 menandai berakhirnya Keultanan Melayu Jambi yang pernah kuat dan

megah dalam percaturan ekonomi berbasis kemaritiman atau peradaban Sungai. Sehingga pada tahun 1906 Jambi dari sistem kesultanan diubah oleh Belanda menjadi daerah Keresidenan yang sistem pemerintahannya diatur oleh kolonial Belanda. Keberadaan Jambi pada masa keresidenan yang disebut terakhir sangat menarik untuk dikaji lebih lanjut secara komprehensif. Selama periode sejarah Indonesia, periode pemerintahan kerajaan Jambi hingga masa keresidenan dikenal sebagai masa "Kurun Niaga", atau perputaran roda ekonomi global. Pada masa itu, jelas bahwa setiap wilayah terlibat dalam urusan perairan di sepanjang jalur perdagangan yang mulai dari Iskandariah di pantai Laut Tengah hingga Kota Pelabuhan Kanton di sebelah timur. Dengan fakta-fakta sejarah tersebut kemudian Para ahli sejarah mengungkapkan bahwa pada masa ini merupakan masa keemasan, kesejahteraan dan kemakmuran bagi Wilayah-wilayah tersebut.

Berdasarkan paparan yang telah diungkapkan di atas maka pertanyaan penelitian yang muncul untuk melihat bagaimana peradaban Sungai Batanghari dalam masyarakat melayu Jambi pada masa keresidenan adalah, Bagaimanakah Peranan Sungai Batanghari dalam dinamika peradaban Masyarakat melayu Jambi pada masa keresidenan?.

Dengan beberapa pembatasan, diskusi tentang peran Sungai Batanghari dalam bidang sosial, budaya, ekonomi, dan perdagangan termasuk dalam topik ini. Namun, batas waktunya adalah antara tahun 1904 dan 1942. Batasan ini dibuat karena selama periode ini, Belanda berhasil menaklukkan wilayah Kesultanan Jambi dan menjadi bagian dari wilayah kolonial Belanda. Kemudian sistem Kesultanan pada tahun 1906 diubah Belanda menjadi sistem keresidenan dibawah pemerintahan Hindia Belanda. Sedangkan tahun 1942 adalah waktu dimana kolonial Belanda berhasil diusir dari bumi Indonesia dan digantikan dengan penjajahan Jepang pada tahun 1942 sampai 1945 sehingga secara resmi sistem keresidenan tidak lagi berlaku di Jambi khususnya dan seluruh wilayah Indonesia pada umumnya.

Selain itu, tulisan ini didasarkan pada fakta bahwa para peneliti belum cukup memperhatikan sejarah lokal, terutama Jambi. Ini terutama berlaku untuk penelitian yang berfokus pada kemaritiman dan peradaban sungai sebagai subjek utamanya. Diharapkan tulisan ini akan menambah pengetahuan dan membantu instansi terkait berpikir dan mempertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan atau kebijakan. Penelitian ini

dicapai melalui proses penggalian dan penelusuran kembali, yang diikuti dengan analisis objektif data sejarah.

THEORETICAL FRAMEWORK (نظريات)

Teori yang tepat untuk diterapkan dalam penelitian ini adalah teori sea power yang dikemukakan oleh Alfred Thayer Mahan. Dalam karyanya yang berjudul "*The Influence of Sea Power upon History*," mengemukakan bahwa "*Sea Power*" memiliki peran sentral dalam kemajuan dan keberhasilan suatu negara. Mahan berpendapat bahwa pemanfaatan potensi kekuatan laut akan memberikan kontribusi positif terhadap kesejahteraan dan keamanan nasional. Sebaliknya, penelantaran terhadap kekuatan laut dapat mengakibatkan kerugian bagi suatu negara bahkan berpotensi meruntuhkannya (Indriata, 2014). Menurut Alfred Thayer Mahan, ada enam faktor yang berpengaruh terhadap "*Sea Power*", meliputi "*Geographical Position* (posisi geografis), *Physical Conformation*, *Extent Of Territory* (luas wilayah), *Number Of Population* (jumlah penduduk), *National Character* (karakter bangsa), dan *Character Of Government* (karakter pemerintahan)" (Mahan, 1889).

Dalam buku "*Sea Power Indonesia*" Dr. Marsetyo menjelaskan "*Sea Power*" juga dapat diartikan sebagai keadaan di mana suatu negara memiliki kekuatan Angkatan Laut yang memadai dan seimbang. Selain itu, *Sea Power* juga mencakup kemampuan suatu negara dalam mengelola dan mengontrol wilayah laut (*sea control*), sambil mencegah pihak lawan untuk menggunakan wilayah laut tersebut (*sea denial*). (Masetyo, 2014). Eksistensi *Sea Power* melibatkan aspek-aspek krusial seperti letak geografis, morfologi fisik, ekstensi wilayah, jumlah populasi, karakter nasional, dan karakter pemerintahan. Sebagai input, "*Sea Power*" mencakup unsur-unsur seperti aparat sipil penegak hukum, Personil pertahanan maritim, serta sumber daya alam dan manusia. Sementara itu, sebagai output, "*Sea Power*" melibatkan konsekuensi kemampuan untuk mengelola laut dan memengaruhi perilaku entitas negara atau non-negara, serta kehidupan perubahan sosial - budaya pada masyarakatnya baik melalui jalur laut maupun di sekitarnya (Mulyono, 2019).

METHOD (طريقة \ منهج البحث)

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk memberikan penjelasan dan gambaran tentang subjek penelitian. Selain itu dikarenakan ini merupakan kajian sejarah maka tidak mungkin peneliti meninggalkan metode penelitian sejarah dalam penelitian ini. Tahapan dalam penelitian sejarah yakni Heuristik (pengumpulan sumber), Kritik sumber (Verifikasi Data), Interpretasi (penafsiran) dan terakhir Historiografi (Penulisan Sejarah). Metode tersebut dilakukan untuk bisa merekonstruksi fakta-fakta sejarah yang telah ada dan melewati tahapan sebelumnya sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh dan menghadirkan pengetahuan terkait dengan objek kajian.

FINDINGS & DISCUSSION (بحث ومناقشة)

1. Sungai Batanghari

Sungai Batanghari, sebagai jalur hidrografis utama di Provinsi Jambi, memainkan peran yang sangat vital dalam ekologi dan kehidupan masyarakat setempat. Sungai batang hari dengan label sebagai sungai terpanjang di Pulau Sumatera, juga menjadi sumber kehidupan bagi sejumlah komunitas yang berdiam di sepanjang alirannya. Masyarakat sekitar Sungai Batanghari mengandalkan Sungai ini untuk berbagai keperluan, mulai dari sumber air bersih hingga sebagai jalur transportasi tradisional. Aliran Sungai Batanghari yang melintasi daerah Tanjung Jabung bagian Timur membawa dampak positif dalam konteks konektivitas regional. Titik Muara Sungai ini bersinggungan dengan Selat Berhala, Selat Karimata, Laut Natuna, dan Selat Malaka, yang menciptakan hubungan perdagangan dan budaya yang penting (Tjandrasasmina, 1992). Daerah perairan ini memiliki relevansi penting sebagai koridor pelayaran yang sangat vital. Keberartian ini timbul dari fakta bahwa Selat Malaka berfungsi sebagai simpul yang menghubungkan perairan di sekitar Asia Timur, Barat, dan Tenggara, dan sebaliknya. Lokasi geografis ini berhasil menyatukan operasional pelayaran dengan dinamika perdagangan di kawasan Asia. Selat Malaka mencatatkan peran sentral dalam panggung global pelayaran, sebagai jalur perdagangan internasional utama yang memiliki dampak signifikan dalam dinamika ekonomi antarbangsa (Saifullah, 2010). Dengan letak geografis yang menguntungkan, wilayah Jambi menjadi tempat intensifnya interaksi dengan para migran dari luar. Jambi telah

mengadakan komunikasi dengan kelompok pendatang yang memasuki daerah tersebut melalui jalur Sungai Batanghari. Mulai dari tahun 644 M hingga awal abad ke-12 M, Jambi memperoleh prestise sebagai pusat perdagangan internasional yang sangat penting, terutama berkat produksi lada yang berlimpah. Selain itu, kontrol atas kegiatan perdagangan di muara Sungai Batanghari berada di tangan masyarakat setempat, terutama penduduk Kesultanan Melayu Jambi.

Keterkaitan yang substansial antara Sungai Batanghari dan peradaban Melayu menjadi suatu fenomena yang tidak dapat diabaikan. Aliran Sungai ini, mulai dari sumbernya hingga muaranya, mengandung beragam catatan sejarah yang erat kaitannya dengan kemajuan peradaban Melayu. Catatan-catatan tersebut menunjukkan bahwa Sungai Batanghari memegang peran sentral dalam munculnya sebuah Kerajaan atau Kesultanan Melayu, yang wilayah kekuasaannya melibatkan seluruh pulau Sumatera. Prestasi ini diberikan penghargaan oleh masyarakat lokal dan tetangga di sekitar daerah tersebut.

Pada abad ke-7 Masehi, Sungai Batanghari menarik perhatian kerajaan-kerajaan yang muncul di Pulau Sumatera, seperti Sriwijaya dan Dharmasraya. Menjadi pusat perdagangan yang strategis, Sungai Batanghari menjadi sangat penting. Sungai ini memiliki kemampuan untuk melintasi banyak wilayah Sumatera, termasuk Sumatera Barat, yang mencakup dua kabupaten, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Dharmasraya. Sungai Batanghari mengalir hampir seluruh kabupaten dan wilayah Jambi, termasuk Kabupaten Bungo, Tebo, Batanghari, Kota Jambi (saat ini), Muaro Jambi, dan Tanjung Jabung Timur. Anak-anak Sungai lain, seperti Sungai Batang Sangir (di Sumatera Barat saat ini), Sungai Batang Tebo, Sungai Batang Tembesi, Sungai Batang Merangin, dan lainnya, bermuara dan berkumpul di Sungai Batanghari. Sungai Batanghari Merupakan Induk Utama dari anak-anak Sungai yang disebutkan tersebut. Muara utama Sungai Batanghari ada pada Sungai Sabak yang tereletak di tanjung Jabung Timut dekat dengan pulau Berahala dan selat Malaka. Dengan luasnya yang hampir mencapai garis Khatulistiwa, yang kemudian membuat Jambi dapat dengan jelas menentukan perbatasan antara wilayah timur dan wilayah barat (J. Velds, 1909).

Kegiatan ekstraksi sumber daya alam dan penebangan hutan di sepanjang jalur Sungai Batanghari telah menyebabkan perubahan signifikan dalam pola alur Sungai. Dampak dari modifikasi tersebut mencakup peningkatan kapasitas air Sungai selama musim hujan dan penurunan yang cepat ketika musim kemarau melanda wilayah Jambi. Sistem ekosistem Sungai Batanghari, sebagai dasar alur Sungai, menjadi habitat yang mendukung kehidupan bagi masyarakat sekitarnya di berbagai sektor geografis. Akibatnya, Daerah Aliran Sungai (DAS) memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi. Empat Taman Nasional berkontribusi pada upaya pengelolaan DAS di sekitarnya dengan berfokus pada keanekaragaman hayati. Taman Nasional Berbak (TNB) berada di bagian hilir DAS Batanghari, dengan Kawasan Konservasi Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) berada di bagian hulu. Taman Nasional Bukit Duabelas (TNBD) dan Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT) berada di bagian tengah.

Dengan sejumlah aktivitas yang terjadi di sepanjang aliran Sungai Batanghari, kawasan ini menjadi destinasi menarik bagi banyak pihak asing yang tertarik untuk terlibat dalam kegiatan perdagangan dan penyebaran agama. Pada masa awal Kerajaan Melayu Kuno, agama Hindu-Buddha berkembang, dan kemudian, pada abad ke- XII, agama Islam mulai menyebar hingga abad ke- XIV. Transformasi ini mencerminkan perubahan status Kerajaan Melayu Jambi menjadi Kesultanan, menunjukkan bahwa Masyarakat Melayu Jambi mulai merangkul agama Islam. Tak hanya itu, kondisi di sekitar Sungai Batanghari juga memikat minat Belanda untuk menjelajahi Jambi dan menguasainya. Pada akhirnya, pada awal abad XX, Belanda berhasil menguasai Jambi setelah Sultan Thaha gugur dalam pertempuran, dan Kesultanan Melayu Jambi beralih menjadi Keresidenan Jambi di bawah pemerintahan Hindia Belanda (Lindayanti, 2014).

2. Keresidenan Jambi

a. Masuknya Belanda sampai menjadi Keresidenan

Bangsa Belanda memasuki wilayah Jambi pada awal abad ke-17, seiring dengan kehadiran *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC), perusahaan dagang Belanda, pada tahun 1602 di Nusantara. Fokus utama VOC pada awalnya terletak di Batavia, namun kemudian mereka mengembangkan operasionalnya ke seluruh wilayah Nusantara, termasuk

Jambi. Pada tahun 1615, VOC datang ke Jambi selama pemerintahan Sultan Abdul Kahar, dipimpin oleh *Onderkoopman* Abraham Streck, membawa dua kapal dagang Belanda, yaitu Wepen van Amsterdam dan Middle Van Burg. Meskipun tujuan awal kedatangan Belanda di Jambi sejalan dengan praktek mereka di wilayah Nusantara, yaitu mencari rempah-rempah dan hasil hutan, strategi licik mereka akhirnya berhasil mengendalikan perdagangan di Jambi. Cara licik ini melibatkan pemberian janji-janji kepada pemerintahan Jambi, sehingga VOC mendapatkan izin dari Sultan Abdul Kahar untuk mendirikan Loji Dagang di Muara Kumpeh pada tahun 1615 (Lukman, 1984). Perubahan dalam sejarah Jambi dimulai seiring dengan berdirinya kantor dagang Belanda. Daerah Jambi yang sebelumnya dikenal dengan suasana yang damai dan tenteram kini mengalami pergeseran menjadi lebih cemas dan gelisah. Hal ini disebabkan oleh tujuan dasar Belanda untuk menerapkan sistem monopoli perdagangan secara paksa, dengan menggunakan tindakan yang bersifat sewenang-wenang. (Masjkuri, 1979). Kehadiran Loji Dagang Belanda di Jambi tidak berlangsung lama karena mendapatkan perlawanan dari masyarakat setempat yang mengetahui praktik-praktik tidak adil yang dilakukan oleh Belanda. Pedagang lokal Jambi lebih memilih untuk berinteraksi langsung dengan Jepara dan menggunakan pedagang Cina sebagai perantara. Oleh karena itu, pada tahun 1624, Belanda terpaksa menutup kantor dagangnya di Jambi

Pelabuhan Jambi, yang kerap dijadikan sasaran oleh para pedagang asing, memberikan dampak ekonomi yang positif bagi Kesultanan Jambi. Kesultanan ini memperoleh pemasukan melalui pengenaan pajak terhadap barang-barang yang tiba di pelabuhan, di mana beberapa jenis barang dikenakan pajak, terutama pada perdagangan lada. Dengan mempertimbangkan potensi pertumbuhan ekonomi yang menjanjikan, Setelah itu, Belanda ingin mengambil alih Jambi seutuhnya, karena Jambi telah menjadi pelabuhan yang menarik bagi para pedagang dari berbagai negara. Pelabuhan Jambi berperan sentral dalam kegiatan perdagangan di wilayah tersebut dan menjadi pusat ekspor lada yang terbesar.

Setelah Sultan Thaha gugur pada tahun 1904, Kesultanan Jambi resmi mengalami kejatuhan dan beralih menjadi bagian dari koloni Belanda. Belanda mengklaim Jambi sebagai wilayahnya sendiri setelah kejatuhan Kesultanan. Wilayah ini kemudian menjadi bagian dari wilayah merdeka Belanda sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Belanda No. 20, yang dikeluarkan pada 4 Mei 1906. Pada tanggal 2 Juli 1906, O.L. Helfrich diangkat sebagai Residen pertama menurut keputusan tersebut (Mubyarto, 1990). Jambi termasuk salah satu dari sepuluh Kota kolonial Belanda di Sumatera Timur. Dalam konteks Jambi, keresidenan yang pusat pemerintahannya berada di Jambi, diperkuat oleh dua asisten residen yang memiliki tanggung jawab mengatur beberapa onderafdeling.

b. Sistem Pemerintahan Keresidena Jambi

Setelah sukses menguasai Jambi, pemerintah Hindia-Belanda memulai perencanaan pembangunan Kota modern sebagai markas administrasi kolonial. Keputusan ini dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yakni faktor politis, ekonomis, dan geografis. Dari segi politis, Belanda mendirikan Kota modern sebagai tempat untuk permukiman keturunan raja di bagian kanan tepian Sungai Batanghari dengan alasan agar keturunan Raja tersebut mudah dikontrol dan diawasi oleh Pemerintah kolonial Belanda. Dari sisi ekonomis, hadirnya Kota modern ini mempermudah perluasan dan peningkatan ekonomi di wilayah Jambi bagi Pemerintah Kolonial Belanda dengan cara memanfaatkan pelabuhan dagang yang sudah ada. Faktor geografis menjadi pertimbangan krusial dalam perencanaan pengembangan wilayah Jambi. Dengan kondisi geografis yang mendukung transportasi melalui jalur perairan, terutama Sungai-Sungai yang melintasi daerah ini, Belanda memandangnya sebagai peluang strategis. Keputusan untuk mendirikan sebuah kota modern sebagai pusat administrasi di wilayah keresidenan diambil sebagai langkah penting dalam penataan perkotaan. Kota ini, yang kemudian diberi nama Kota Jambi, bukan hanya menjadi pusat pemerintahan tetapi juga menjadi simpul vital dalam jaringan transportasi dan perdagangan. Dengan demikian, pengembangan wilayah ini tidak hanya mencerminkan kebijakan administratif Belanda, tetapi juga memanfaatkan

secara optimal potensi geografisnya untuk mendukung aktivitas transportasi dan perdagangan yang menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi di masa itu (Miftahurrah, 2021).

Untuk mencapai agenda politik kolonialnya, pemerintahan Belanda yang menduduki menggunakan pendekatan desentralisasi, birokrasi, dan feodalisme. Mereka menerapkan strategi ini dengan memperluas cakupan pemerintahan melalui desentralisasi, mengorganisir sistem birokrasi untuk mengelola administrasi secara efisien, dan memanfaatkan struktur feodal untuk menjaga kendali atas wilayah yang dikuasai. Tak hanya itu, kebijakan kekerasan dan pemanfaatan undang-undang menjadi alat utama dalam menduduki dan mengoptimalkan potensi wilayah. Keseluruhan pendekatan ini mencerminkan upaya pemerintahan kolonial Belanda yang terkoordinasi dengan kompleksitas taktik, semua demi mengamankan dan memaksimalkan sumber daya di daerah yang dikuasainya (Wina, 2021). Upaya pemerintahan Belanda dalam mengendalikan Jambi melibatkan restrukturisasi wilayah menjadi keresidenan pada tahun 1906, dengan pusat administrasi berada di Jambi. Dalam kerangka kebijakan politik liberal Belanda di Jambi, terdapat pembatasan terhadap gaji penduduk lokal, termasuk kompensasi pekerja di sektor peternakan dan biaya sewa tanah. Pelaksanaan kebijakan politik liberal ini menyebabkan penurunan kondisi ekonomi masyarakat Jambi dan peningkatan tingkat kemiskinan (Suwondo, 1979).

Belanda mengambil alih Jambi pada tahun 1901 dan menempatkannya dalam keresidenan Belanda di Palembang. Setelah terjadi konflik dan gugurnya Sultan Thaha dalam perlawanan melawan Belanda pada tahun 1904, Kemudian Jambi di ambil alih oleh Kolonial Belanda. Pada tahun yang sama, Belanda memulai persiapan untuk menjadikan Jambi sebagai wilayah keresidenan, dan pada tahun 1906, secara resmi Jambi menjadi keresidenan dengan ibu Kota di wilayah Jambi. Sistem pemerintahan Belanda berusaha menyatukan masyarakat hukum dengan menggabungkan desa-desa kecil yang memiliki hukum dan kepemilikan tanah sendiri, meskipun struktur tata adat masih mengikuti pola zaman Kesultanan dengan beberapa

penyesuaian sesuai kebijakan penjajahannya. Setidaknya struktur jabatan dalam pemerintahan kolonial Belanda terdapat Pemangku Jembatan tertinggi dipegang oleh Kepala Residen (Kepala Gewest/Keresidenan), kemudian dibawahnya ada Kontelir (Kepala wilayah kabupaten/ Afdeling), selanjutnya ada Demang (kepala Distrik/Kewedanan), kemudian Asisten Demang (Kepala kecamatan/ Onder distrik) dan selanjutnya yang terakhir ada Kepala Adat (kepala wilayah/Desa setempat atau dikenal dengan istilah marga/batin).

Sistem pemerintahan yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda di Keresidenan Jambi tidak secara instan membentuk struktur pemerintahan yang tetap seperti yang terlihat pada Bagan 2.1 di atas. Sebaliknya, sistem tersebut mengalami beberapa perubahan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kondisi masyarakat dan wilayah Jambi secara umum. Faktor-faktor tersebut mencakup perubahan sosial, iklim, dan elemen-elemen lainnya. Selanjutnya, akan dijelaskan perubahan-perubahan dalam sistem pemerintahan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya di Keresidenan Jambi dari awal hingga akhir, sebagai berikut:

Tabel. 2.1 Kejadian yang pernah terjadi pada Kereseidenan Jambi 1906-1920

No	Tahun	Peristiwa Sejarah
1	1906	"Dalam rentang waktu 1906 hingga 1916, terjadi beberapa kali restrukturisasi dalam pemerintahan pribumi di Jambi. Selama periode tersebut, Jambi dikelola oleh lima individu penduduk setempat yang masih tergolong muda dan belum memiliki pengalaman yang memadai dalam menjalankan tanggung jawab pemerintahan"
2	1908	"Di Kabupaten Bangko, terdapat 161 dusun dengan jumlah kepala kampung sebanyak 372 dan terbagi dalam 15 distrik melalui sistem onderafdeeling"
3	1912	"Setelah diterapkannya sistem onderafdeeling yang mencakup area yang terlalu luas, terjadi restrukturisasi dalam pelaksanaan pemerintahan di tingkat distrik. Sistem administrasi lama yang berlaku selama masa pemerintahan Kesultanan dihapuskan ketika Jambi menjadi bagian dari wilayah Hindia Belanda"
4	1914	Ketika penduduk menyadari bahwa pemerintah Belanda telah memperoleh otonomi melalui <i>Gemeente Read</i> (karya Kota Madya) untuk keperluan

		penjajahan, suasana di masyarakat menjadi tidak stabil”
5	1915	Pada wilayah Muara Tembesi, Distrik dalam Sistem dibagi menjadi tiga, dan salah satunya melibatkan pengorganisasian pemerintahan Belanda”
6	1916	“Dalam kerangka manajemen pemerintahan Federasi Nan Betigo Dalam, Departemen membagi wilayahnya menjadi sembilan distrik, di antara 9 tersebut ada di wilayah muara bungo yang kemudian mengakibatkan pemukiman masyarakat terlokasi ke bagian tepi Sungai”
7	1917	“Jumlah Penduduk Jambi sebanyak 138.539 pada masa keresidenan yang terdiri masyarakat lokal dan masyarakat pendatang dari Pulau sumtra, Jawa, Kalimantan dan Sulawesi serta masyarakat asing dari luar Indonesia”
8	1918	“Pada kurun tahun 1914-1918, terjadinya ketidakstabilan sosial yang terjadi di masyarakat. Penyebabnya adalah pengetahuan pemerintah Belanda yang memberlakukan otonomi melalui <i>Gemeente Read</i> (tulisan Kota Madya) yang dipergunakan untuk kepentingan penjajahan”
9	1919	”Pada rentang tahun 1914-1919, perang dunia pertama memberi dampak yang sangat signifikan seperti terjadinya krisis ekonomi di wilayah Jambi. dan pada akhirnya krisis pangan pun terjadi pada masyarakat terutama pada bahan makanan pokok seperti beras
10	1920	”Kerja Paksa yang diterapkan pemerintah Kolonial, membuat masyarakat banyak melakukan migrasi ke daerah lain dan meninggalkan Jambi”

(Sumber: Wina Syandra Suryani, 2015: 5-6)

3. Aktivitas Hulu-Hilir Sungai Batanghari Masa Keresidenan Jambi

Wilayah Sungai Batanghari menyimpan catatan sejarah yang panjang. Sebelum abad ke-19 Masehi, Sungai ini memiliki peran utama sebagai jalur vital yang menghubungkan antara daerah pedalaman dan pesisir. Pengangkutan manusia dan barang secara teratur terjadi melalui rute Sungai, dan bukti arkeologis menunjukkan adanya pemukiman kuno di tepian Sungai Batanghari. Sungai ini menjadi elemen kunci dalam distribusi komoditas lokal dan berfungsi sebagai jalur transportasi yang menghubungkan berbagai wilayah di Jambi.

Keterkaitan antara daerah pedalaman dan pesisir tercermin melalui kegiatan perdagangan yang berlangsung di sepanjang lintasan Sungai Batanghari (Tasman, 2016).

Sungai Batanghari memiliki peranan vital sebagai koridor penting untuk aktivitas pelayaran dan perdagangan pada masa lalu, terutama selama masa kejayaan Kerajaan Sriwijaya. Sebagai sarana transportasi yang handal untuk pelayaran dan perdagangan, baik dalam skala nasional maupun internasional pada periode tersebut, Sungai ini memiliki dampak yang signifikan bukan hanya dalam ranah ekonomi, tetapi juga melibatkan aspek sosial, budaya, dan agama. Kontribusi positif Sungai Batanghari terhadap masyarakat di sekitarnya dapat dianggap sebagai bukti nyata dari kemajuan berarti dalam peradaban masyarakat Jambi. Sebagai penopang utama kehidupan, Sungai ini memainkan peran yang sangat krusial bagi penduduk yang bermukim di sepanjang jalur alirannya.

Perjalanan historis yang panjang dan karakteristik unik di sepanjang Sungai Batanghari menjadi fokus perhatian bagi pihak Belanda, yang kemudian menjadikan Jambi sebagai wilayah di bawah kontrol kolonial mereka. Pada periode tersebut, penekanan pada kelancaran mobilitas masyarakat antara wilayah Hulu dan Hilir semakin ditekankan, mengingat adanya hambatan dalam sektor transportasi darat pada waktu itu. Keputusan untuk menggunakan Sungai sebagai jalur utama transportasi menjadi pilihan yang sangat logis. Sungai Batanghari memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap kemajuan peradaban di sepanjang alirannya. Pertumbuhan aktivitas ekonomi tampak di sepanjang Sungai ini, sementara interaksi sosial antara masyarakat Jambi dengan kelompok lainnya terjadi sepanjang koridor Sungai. Realita ini mencerminkan peran kunci Sungai Batanghari dalam merinci perkembangan masyarakat Melayu Jambi, bukan hanya dalam sektor ekonomi, melainkan juga dalam ranah sosial dan kebudayaan.

a. Aktivitas Perekonomian

Jambi, dalam periode pemerintahan Kolonial Belanda, diperkenalkan pada jenis tanaman baru seperti karet dan kegiatan pertambangan minyak bumi. Pada era tahun 1920-an, ekonomi Jambi terus mengalami perkembangan, dengan partisipasi yang semakin besar dari investor swasta di daerah tersebut. Luasnya lahan yang terus berkembang dimanfaatkan oleh

pemerintah dan sektor swasta untuk membuka perkebunan tanaman ekspor. Sejumlah kegiatan perdagangan luar negeri juga ikut serta dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Jambi (Lindayanti, 2014).

Selama periode Keresidenan Jambi, fokus utama dalam pengembangan ekonomi terletak pada komoditas karet dikarenakan tingginya nilai pasar internasional pada waktu tersebut. Dampaknya, pemerintah kolonial Belanda mendorong penduduk Jambi untuk melaksanakan penanaman karet secara luas di seluruh wilayah. Meskipun demikian, ini tidak berarti bahwa komoditas lain diabaikan. Beberapa komoditas seperti lada, cengkeh, kopi, kelapa sawit, pinang, hasil olahan kayu, emas, dan minyak tetap dihasilkan oleh masyarakat di sebagian wilayah Jambi secara simultan.

Tanaman komoditas ditanam sepanjang tepian Sungai Batanghari, dan anak-anak Sungainya dan daerah rawa di Jambi. Hal ini mencerminkan peran yang sangat penting dari Sungai Batanghari dalam kegiatan ekonomi masyarakat Jambi selama masa Keresidenan. Penanaman komoditas di tepi Sungai dilakukan dengan tujuan untuk memudahkan pengangkutan hasil komoditas ke Pusat Pemerintahan (Hilir Sungai Batanghari), di mana barang-barang tersebut dijual kepada pembeli dari berbagai negara, termasuk pemerintah Belanda.

Melalui ekspedisi sepanjang Sungai Batanghari, produk komoditas Hutan Jambi dari Hulu dapat mencapai Hilir dengan menggunakan perahu atau sampan. Ketergantungan masyarakat Jambi pada Sungai Batanghari, yang telah berlangsung sejak masa lalu hingga masa Keresidenan, terlihat jelas. Dengan demikian, Sungai-Sungai di wilayah Jambi, terutama Sungai Batanghari, dianggap sebagai pusat dari setiap kegiatan ekonomi yang terjadi selama masa Keresidenan Jambi.

b. Aktiviats Sosial – Budaya

Perkembangan peradaban dengan adanya Sungai Batanghari tidak hanya menekankan dimensi ekonomi, tetapi juga aspek-aspek sosial dan kebudayaan. Adanya perpindahan penduduk yang terpengaruh oleh Sungai

Batanghari terhadap penduduk lokal Jambi dan kelompok masyarakat asing telah memungkinkan terjadinya interaksi sosial di antara beragam kelompok masyarakat. Hal ini memberikan kesempatan bagi perubahan dalam kerangka sistem sosial dan budaya yang dialami oleh masyarakat.

Interaksi yang terjadi sudah berlangsung sejak zaman Melayu kuno, mulai dari periode Kerajaan Sriwijaya, Kesultanan Melayu Jambi, hingga masa Keresidenan Jambi, bahkan hingga saat ini. Sungai Batanghari menjadi pusat dalam dinamika interaksi antara masyarakat Jambi dan pihak pendatang. Melalui interaksi ini, terdapat potensi perubahan dalam struktur sosial dan kebudayaan masyarakat Jambi, termasuk penyebaran ajaran agama. Pada tahap awal sejarah Jambi di bawah pemerintahan Kerajaan Sriwijaya, terjadi penyebaran agama Hindu dan Buddha. Pada masa Kesultanan, Sungai Batanghari kembali menjadi fokus penyebaran agama, terutama Islam, yang diperkenalkan oleh pedagang Arab, Gujarat, Turki, dan masyarakat Hulu setelah melakukan perjalanan melalui Sungai ke hilir dan mendapatkan informasi tentang Islam. Pada masa Keresidenan, terdapat kolonialisasi Belanda dengan misi 3G, yaitu Gold (emas) untuk menguasai perdagangan dan mendapatkan keuntungan materi, Gospel (Injil) untuk menyebarkan agama Kristen (Kristenisasi), serta Glory (kejayaan) dengan maksud menguasai seluruh wilayah sebagai daerah jajahan mereka.

Aktivitas yang dilakukan oleh pihak Kolonial Belanda di Keresidenan Jambi juga melibatkan pelaksanaan misi 3G. Dengan memanfaatkan Sungai sebagai sarana utama, terutama Sungai Batanghari, mereka menyebarkan agama Kristen dan memperkenalkan Budaya Eropa (Westernisasi) pada masa tersebut. Sebagai hasilnya, komunitas Jambi mulai mengadaptasi unsur-unsur kebudayaan Eropa dan mengintegrasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari mereka.

CONCLUSION (خلاصة \ خاتمة)

Dalam konteks pembahasan wilayah Jambi, peran vital Sungai Batanghari senantiasa menjadi fokus tanpa pernah terabaikan. Kehadiran Sungai ini memberikan dampak yang monumental terhadap peradaban masyarakat Jambi, terutama pada masa Keresidenan Jambi. Lebih dari sekadar elemen geografis, Sungai Batanghari berfungsi

sebagai pendorong utama kemajuan wilayah Jambi sepanjang sejarah, khususnya pada periode Keresidenan Jambi. Fungsinya melampaui sekadar memfasilitasi kegiatan perdagangan dari Hulu (area produksi komoditas) ke Hilir (pusat pemerintahan/daerah perdagangan), melainkan juga membawa pengaruh yang signifikan pada berbagai aspek sosial dan budaya. Transformasi yang terlihat dalam berbagai aspek tersebut merupakan hasil dari interaksi yang terjadi antara masyarakat Jambi dan komunitas asing selama periode Keresidenan Jambi, yang secara substansial dipengaruhi oleh keberadaan Sungai Batanghari.

BIBLIOGRAPHY (قائمة المراجع)

- Budi Utomo Bambang. (1994) *Swarnnadwipa Abad XIII-XIV Masehi: Penggunaan atas Sumber Emas di Hulu Batanghari (Sumatra Barat)*, Jurnal: Berkala Arkeologi, Volume 14 No. 2.
- Masetyo, (2014), *Sea Power Indonesia*. Ed.1. Jakarta: Universitas Pertahanan
- Guillot, Claude. (2006), *Banten: Sejarah dan Peradaban Abad X-XVII*. (Jakarta: KPG, EFEO dan Puslitbang Arkeologi Nasional, 2008), hal.27; Uli Kozok. *Kitab Undang-undang Tanah Tanjung: Naskah Melayu yang Tertua*. Jakarta: Yayasan Naskah Nusantara dan Yayasan Obor Indonesia
- Hardiana, Indriata. (2014), *Menuju Indonesia sebagai Poros Maritim*, dalam [Http://setkab.go.id/menuju-indonesia-sebagai-poros-maritim/](http://setkab.go.id/menuju-indonesia-sebagai-poros-maritim/), 21 Oktober 2014, diakses 21 Desember 2023, pukul 19.00 Wib
- Lapian, A.B. (1992). *Jambi Dalam Jaringan Pelayaran Dan Perdagangan Masa Awal*. (Jambi: Kerjasama Pembda Tingkat I Propinsi Jambi Dengan Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jambi
- Lindayanti, dkk. (2014). *Jambi Dalam Sejarah 1500-1942*. Jambi: Pusat Kajian Pengembangan Sejarah dan Kebudayaan Jambi.
- Locher, Elsbeth Scholten, (2008) *Kesultanan Sumatra dan Negara Kolonial: Hubungan Jambi-Batavia (1830-1907) dan Bangkitnya Imperialisme Belanda*, Jakarta: Banana KITLV Mahan,
- Alfred Tayer. (1989) *The Influence Of Sea Power Upon Histori, 1660-1783*. Ed.1. London: Cambridge University
- Masjkuri. (1079) Sultan Thaha Syaifuddin. Jakarta: Depdikbud, Proyek Inventarisasi Sejarah Nasional
- Miftahurrahmat. (2018), *Kota Jambi Sebagai Pusat Pemerintahan Kolonial Dan Pelabuhan Dagang 1906-1942*, Skripsi Departemen Sejarah Fakultas Adab Dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi

- Miftahurrah. Aliyas. Rahyu Zami. (2022), *Kota Jambi Sebagai Pusat Pemerintahan Kolonial Belanda*. Jurnal Sejarah Peradaban Islam, Vol.4, No.1.
- Mubyarto, Dkk. (1990), *Masyarakat Pedesaan Jambi Menuju Desa Mandiri*. Pusat Penelitian Pembangunan Pedesaan dan Kawasan (P3PK) Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta: Aditya Media
- Utomo, Ilham. Nur Fanada Sholihah, (2019), *Dari Hilir Ke Hulu: Perkembangan Sejarah Maritim Indonesia Dan Selingkar Permasalahannya*, Dalam: Seminar Nasional dan Temu Alumni HMPS
- Rachman, Lukman, dkk. (1983-1984), *Sejarah Perlawanan Terhadap Kolonialisme dan Imprealisme Di Jambi*, Arsip Daerah Jambi No 503. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek-Proyek dan Dokumentasi Sejarah Nasional.
- Rahim, Arif. (2021), *Kesultanan Jambi dalam Jaringan Perdagangan Antar Bangsa (1480-1834)*, Jurnal ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 21(3), Oktober
- Saifullah. (2010). *Sejarah Kebudayaan Islam Di Asia Tenggara*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sri Hutomo, Mulyono. (2019), *Laksamana TNI (Purn) Prof.Dr. Marsetio Paparkan Sea Power Indonesia Pada Kuliah Perdana Sekolah Pasca Sarjana UGM*, dalam <https://indomaritim.id/laksamanatni-purn-prof-dr-,marsetio-paparkan-sea-powerindonesia-pada-kuliah-perdana-sekolah-pascasarjana-ugm/>, diakses tanggal 20 Desember 2023
- Yandra, Wina Suryani. (2021), *Peranan Rio Dalam Pemerintahan Masyarakat Jambi Pada Masa Keresidenan Belanda (1906-1925)*. Skripsi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Univeristas Batanghari Jambi
- Suwondo, Bambang. (1979), *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Jambi*, Jakarta: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
- Tim Penyusun. (2018), *Provinsi Sumatera Tengah*. Republik Indonesia, Kementerian Penerangan
- Tjandrasasmina, Uka. (1992), *Beberapa catatan tentang perdagangan di DAS Batanghari hubungannya dengan jalur perdagangan Internasional : Pada abad-abad pertama sampai abad XVI*, dalam seminar sejarah Melayu Kuno Jambi, Jambi : Pemerintah DT I, 7-8 Desember
- Velds, J. *De Onderwerpring van DJambi in 1901 – 1907*, Batavia: Departement van Oorlog